

TESIS
IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS
TERHADAP JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



Disusun oleh :

PRO PATRIA

ONYONG UMANAILO

NIM : 12214032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

TESIS**IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS****TERHADAP JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

Disusun Oleh :

ONYONG UMANAILO
NIM : 12214032

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

• SURABAYA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Disetujui

Pada tanggal, *12 Agustus 2016*

Oleh Dosen Pembimbing :

[Signature]
Dr. Habib Adjie , S.H., M.Hum.

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

[Signature]
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

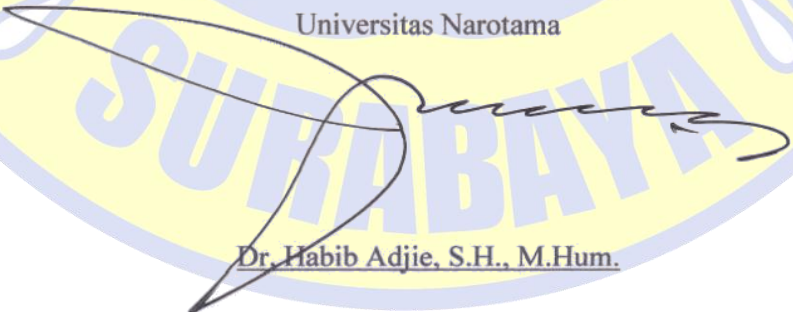
LEMBAR PENGESAHAN**Tesis Ini Telah Direvisi****Pada Tanggal : 22 Agustus 2016**

Oleh Dosen Pembimbing :


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
PRO PATRIA
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.


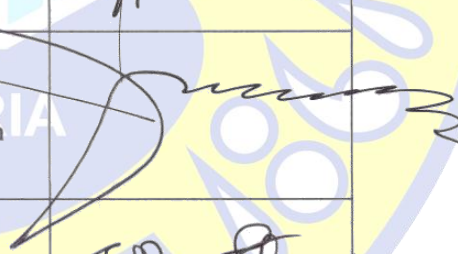



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

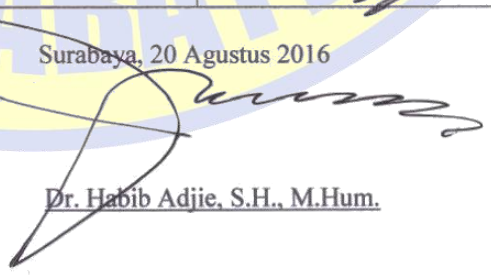
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : Onyong Umanailo
 NIM : 12214032
 Tanggal Penilaian : 20 Agustus 2016
 Judul Tesis : IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN
 NOTARIS TERHADAP JABATAN PEJABAT PEMBUAT
 AKTA TANAH
 Pembimbing : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Prof. Dr. Afdol, S.H., MS	
ANGGOTA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H	

Surabaya, 20 Agustus 2016


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

SURAT PENUGASAN

No. 165/NR-FH/03/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum	12214032	Onyong Umanailo	Implikasi Hukum Penyalagunaan Jabatan Notaris Terhadap Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Maret 2016



Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



Onyong Umanailo
NIM : 12214032

PRO PATRIA

SURABAYA

MOTTO :

- ❖ **Hidup Ini Adalah Pilihan**
- ❖ **Baik dan Buru Itu Pilihan Manusia**
- ❖ **Allah telah meletakkan kedua pilihan, mau memilih yang mana..?**
- ❖ **Kegagalan hanaya terjadi bila kita menyerah dengan cepat tanpa usaha yang keras.**

Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk :

Kemulian

Allah Subhannahu Wa Ta'ala

Allah Maha Besar

Allah Maha Mengetahui

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Mengetahui, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah saya bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis ini yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS TERHADAP JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”.

Dalam Tesis ini merupakan hasil dari sebuah proses yang relatif panjang, memerlukan tenaga, pikiran dan waktu. Tanpa adanya semangat, motivasi, kesabaran dan kerja keras serta tidak lupa diiringi dengan doa, tidaklah mungkin saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini dapat saya selesaikan berkat bimbingan, arahan, masukan dan bantuan dorongan moral, yang tulus diberikan oleh Pembimbing serta pihak-pihak yang ikut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan penuh keikhlasan dan segala rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Habib Adjie S.H. M.Hum atas kesediaannya memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Ibu. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, DS. ST., MPH, yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah di Universitas Narotama Surabaya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Bapak Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya. Yang telah menyalurkan ilmu hukum di bidang kenotarisan dengan baik.
5. Para Staf Administrasi Program Studi Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya. Yang telah memberikan pelayanan dalam perkuliahan saya.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah banyak membantu dalam memberikan saran, moral dalam penulisan tesis.
7. Secara tulus dan junjung rasa hormat penulis kepada kedua Orang tua saya, Bapak Abas Umanailo dan Mama Wa'su Lapandewa, yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang dan tidak sedikit pengorbanan yang diberikan baik moril maupun materiil, Kepada oma San dan bongso Nui, bongso Ony, dan Adik-adik saya, terima kasih atas semuanya dukungan yang diberikan selama ini..

Surabaya, 20 Agustus, 2016
Penulis

Onyong Umanailo

RINGKASAN

IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS TERHADAP JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ini sesuai asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum. Baik notaris yang merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berlandaskan hukum dalam menjalankan aktifitas kedua jabatan tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan dalam hukum administrasi selalu diparelekan dengan konsep *detournement de pou voir*. Philipus M. Hadjon “menyebut dengan penggunaan wewenang tidak sebagai mestinya”. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata lain, pejabat telah melanggar asas spesialisasi. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara sadar, yakni mengalihkan tujuan yang diberikan wewenang itu. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* atau kepentingan pribadi, atau kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar walaupun itu dilarang namun tetap dilakukannya.

Penerapan sanksi dalam satu jabatan notaris dirasa belum cukup, karena ada akibat hukum yang di bebaskan atau di timbulkan terhadap jabatan PPAT dijabatnya.

Sehingga diperlukan komulasi atau penggabungan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT. Dengan demikian sanksi notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada kedua jabatan, baik jabatan notaris dan jabatan PPAT yang di rangkap itu sendiri dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat kekosongan norma hukum mengenai ketentuan penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana teori kepastian hukum ini berkaitan erat dengan aspek pertanggung jawaban sanksi terhadap jabatan notaris dan jabatan PPAT yang dijabat oleh orang yang sama. Dari apa yang telah diuraikan tersebut muncul permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Apakah sanksi penyalahgunaan jabatan notaris berlaku juga terhadap jabatan pejabat pembuat akta tanah
2. Apa akibat hukum notaris yang di pidana dalam penyalahgunaan jabatan notaris yang juga sebagai PPAT.

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menguraikan sebagai berikut, sanksi perdata dan sanksi administrasi yang di jatuhkan terhadap jabatan notaris berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat makan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pasal 9 UUI-Perubahan dan pasal 12 UUI-Perubahan. Sesuai

penafsiran sistematis, yaitu melalui metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak dapat dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, karena dalam pasal 10 ayat (4) huruf e dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di berhentikan sementara dari jabatannya. Secara tidak langsung sanksi perdata ini berlaku juga terhadap jabatan PPAT yang dijabatnya, karena harta notaris dan PPAT tidak dipisahkan secara hukum. Karena, pertanggungjawabkan secara individu sebagai subjek hukum yang sama. Tidak seperti badan hukum (perseroan terbatas), (yayasan) dan (perkumpulan) harta kekayaan pribadi dipisahkan dari jabatan pengurus perseroan atau yayasan. Penulis berpendapat bahwa Notaris dan PPAT yang dijabat oleh orang yang sama melakukan penyalahgunaan jabatan notaris berimplikasi terhadap jabatan PPAT.

Notaris yang dipidana dan menjalani hukuman penjara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Pusat akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mencabut ijin operasionalnya (ijin tugas) dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 13 UUJN-P dimana “notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih”.

Notaris yang dipidana penjara kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika notaris berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu “Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu

Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandanginya tidak dalam keadaan bebas menjalankan tugas sebagai PPAT. Jabatan PPAT yang dijabatnya dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan PPAT yang disandanginya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan tugas sebagai PPAT membuat akta. Dalam hal ini untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kedua jabatan tersebut dan organisasi jabatan, apabila notaris yang dipidana menjalankan tugas sebagai PPAT dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya di hadapan masyarakat. Keadaan tidak cakap untuk

membuat akta adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebab menurut pasal 1330

KUH Perdata



ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ini sesuai asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum. Baik notaris yang merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus berlandaskan hukum dalam menjalankan aktifitas kedua jabatan tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan dalam hukum administrasi selalu dipararelkan dengan konsep *detournement de pou voir*. Philipus M. Hadjon “menyebut dengan penggunaan wewenang tidak sebagai mestinya”. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata lain, pejabat telah melanggar asas spesialisasi.

Berdasarkan uraian di atas terdapat kekosongan norma hukum mengenai ketentuan penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana teori kepastian hukum ini berkaitan erat dengan aspek pertanggung jawaban sanksi terhadap jabatan notaris dan jabatan PPAT yang dijabat oleh orang yang sama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi penyalahgunaan jabatan notaris baik sanksi perdata dan sanksi administrasi yang di jatuhkan terhadap jabatan notaris berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat makan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pasal 9 UUNJ-Perubahan dan pasal 12 UUNJ-Perubahan. Sesuai penafsiran sistematis, yaitu melalui metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Akibat dari hukuman penjara tersebut jabatan PPAT yang disandangnya tidak dalam keadaan bebas menjalankan tugas sebagi PPAT. Jabatan PPAT yang dijabatnya dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dalam hal ini jabatan PPAT, dan lain-lain. Menurut penulis jabatan PPAT yang disandangnya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk menjalankan tugas sebagai PPAT membuat akta.

Kata Kunci : Jabatan Notaris, Jabatan PPAT, Sanksi, Perdata, Administras, Pidana,

ABSTRACT

Indonesia is a rule of law. It is confirmed in Article 1 subsection 3 of the Constitution of the Republic. It is appropriate that the principle of legality is one of the main principles that serve as the basic foundation in each of governance in every country that adheres to the concept of state law. Neither notary who official certifier (OC) should be based on law in carrying out activities of both these positions.

The concept of abuse of authority or abuse of office in the administrative law always paralleled with the concept “detournement de pou voir”. Philip M. Hadjon said “The use of authority is not as it should be”. In this case, the officer uses his authority to other purposes that deviate from the objectives that have been given to that authority. In other words, officials have violated the principle of specialty.

Based on the description above, there are vacancy legal norms regarding the provisions of sanctions for notary who doubled OC in the running of their office, where the theory of legal certainty is closely related to aspects of the sanctions against positions accounted Notary and OC positions are held by the same person.

The method of this study was a normative legal research that was legal research conducted by researching library materials or secondary law. While in locating and collecting data is done by two approaches, namely laws and conceptual approaches.

The results showed that the sanction abuse of office notary both civil penalties and administrative sanctions to the office of notary apply to the positions of OC. If the notary did not pay the costs, damages and interest to the plaintiff, he would be

suspended from his position. Moreover, he would get fired disrespectfully. This was in accordance with article 9 and article 12 in amendment of legislation. This was in accordance with a systematic interpretation, namely via a method to interpret the legislation by linking to legal regulations or with the entire justice system.

The impact of the penalties, he assumed the post of OC not in a free state in the line of duty as an OC. Then, automatically there were a few rights of citizenship were also restricted, such as the right to elect and be elected (in relation to the general election), namely the right to hold public office positions OC, and others. According to the authors, the position he held OC considered incompetent or were not authorized to perform the task as OC.

Keywords: Notary, Official Certifier, Penalty, Civil, Administrative, Criminal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji	iii
Lembar Pengesahan Revisi	iv
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Orisinalitas Penelitian	8
1.6. Tinjauan Pustaka	9
1.7. Metode Penelitian	20
1.8. Sistematika Penulisan	25
BAB II SANKSI PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS	
BERLAKU JUGA TERHADAP JABATAN PPAT	27
2.1. Notaris Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Notaris	27
2.2. Sanksi-Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Notaris	35
2.2.1. Sanksi Perdata Terhadap Notaris melakukan Penyalahgunaan Jabatan	35

2.2.2. Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Melakukan Penyalahgunaan Jabatan Notaris	45
2.2.3. Sanksi Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Notaris	53
2.2.4. Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Penyalahgunaan Jabatan	60
2.3. Sanksi Perdata, Sanksi Administrasi dan Notaris Yang Dalam Proses Penahanan, Menjadi Terdakwa Di Berhentikan Sementara Dari Jabatannya dan Berlaku Juga Terhadap Jabatan PPAT.....	69

BAB III AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG DIPIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS YANG JUGA SEBAGAI PPAT

3.1. Pengertian Jabatan Notaris dan Jabatan PPAT	79
3.2. Kewenangan, Tata Cara Pemberhentian Notaris dan PPAT Dari Jabatannya	86
3.2.1 Tata Cara Penegakan Kode Etik Notaris (INI), Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya	86
3.2.2. Tata Cara Penegakan Kode Etik IPPAT Dilakukan Untuk Pemberhentian PPAT.....	90
3.3. Akibat Hukum Notaris Yang di Pidana Terhadap Penyalahgunaan Jabatan Yang Juga Sebagai PPAT	99

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	111
2. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Notaris yang melakukan penyalahgunaan jabatan notaris, sanksi yang dijatuhkan baik sanksi perdata, sanksi administrasi berlaku terhadap jabatan PPAT, apabila notaris tidak membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat maka notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pasal 9 UUNJ-Perubahan dan pasal 12 UUNJ-Perubahan. Sesuai penafsiran sistematis terhadap pasal 10 ayat (4) huruf e dan ayat (2) huruf d PJPPAT-P bahwa “dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di berhentikan sementara dari jabatannya”. Secara tidak langsung sanksi perdata ini berlaku juga terhadap jabatan PPAT yang dijabatnya, karena harta notaris dan PPAT tidak dipisahkan secara hukum karena, pertanggungjawaban secara individu sebagai subjek hukum yang sama. Tidak seperti badan hukum (perseroan terbatas), (yayasan) dan (perkumpulan), harta kekayaan pribadi dipisahkan dari jabatan pengurus perseroan atau yayasan. Penulis berpendapat bahwa

Notaris dan PPAT yang dijabat oleh orang yang sama melakukan penyalahgunaan jabatan notaris berimplikasi terhadap jabatan PPAT.

- 1.2. Notaris yang dipidana dan menjalani hukuman penjara yang juga sebagai PPAT tidak bisa menjalankan tugas sebagai PPAT karena, jabatan yang diembannya tidak dalam keadaan bebas dan tidak cakap dalam membuat akta, karena dalam status terpidana penyalahgunaan jabatan notaris. Apabila akta yang dibuatnya dihadapannya tersebut, akta tidak mempunyai kekuatan mengikatnya sebagaimana mengikatnya akta otentik, melainkan hanya mengikat para pihak sebagai penghadap sebagaimana akta di bawah tangan, karena notaris sedang menjalani pidana penjara, selaku PPAT tidak etis membuat akta dalam penjara atau penandatanganan akta di dalam penjara.

2. Saran

- 2.1. Bagi pemerintah hendaknya membuat aturan pelaksana tentang notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT dalam hal tentang penyalahgunaan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu jabatan agar ada kepastian hukum yang jelas. Karena dalam UUJN-P dan PJPPAT-P maupun kode etik jabatan notaris dan kode etik PPAT tidak mengatur secara tunggal. Dengan tujuan yang sama di depan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap notaris melakukan penyalahgunaan jabatan Sanksi dijatuhkan kepada kedua jabatan tersebut secara langsung..

2.2. Terkait dengan adanya kekosongan hukum mengenai status hukum notaris yang dipidana yang sudah sebagai PPAT, maka hendaknya bagi pemerintah untuk membuat aturan pelaksana dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun PJPPAT-P sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris yang telah menjalani hukuman penjara dan jabatan PPAT yang diembannya ada kepastian hukum. Keadaan demikian diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, konsiten dan terintegrasi, yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* , UII Press, Yogyakarta, 2009
- Aminuddin Iimar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada media Group, Bandung, 2014.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Galia Indonesia, Cet.3, Bogor, 2011.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Dwidja Priyatno, , *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004,
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan (Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

_____, Penafsiran Tematik *Hukum Notaris Indonesia UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2015.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Herlina Boediono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, 2010.

Inriyanto Seno Adji dalam Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Grenada Media Group, Jakarta, 2014.

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.3, Kencana Grenada Media group, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum*, Yuridika, Cet. 1, Suarabaya, 1992.

_____, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, Ten Berge, Van Buuewn, Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

_____, -Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gaja Mada University Press, Jogjakarta, 2002

Ilhami Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru Tentang „Rule of law and rule of ethics“ dan Constitutional and Constitutional ethics’)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Jum Anggriani, *Hukum Administarasi Negara*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2012.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.

Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988

Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1992.

M. Solly Lubis, *Flisafa Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

Samadi Surya Barata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia), Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4432.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120), Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 31 Agustus-1 September 2007.

Kode Etik Jabatan Notaris Tanggal 30 Mei 2015.

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005

Alvin Leonard Harso, *Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Suarabaya , 2007.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana>, diakses tanggal 18 Mei, 2016

